

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Indonesia secara berkala melakukan pembangunan fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat, maka perlu ditanamkan dan dipersiapkan sejak dini. Jika ditanamkan sejak dini, maka anak tersebut akan mulai peka sejak dia masih kecil sehingga dapat tercapai kesejahteraan paling tidak bagi dirinya sendiri.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 menjelaskan bahwa, “Fakir Miskin dan ana-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Itu berarti negara harus bisa menjamin dan memberdayakan dan memberikan jaminan sosial mereka-mereka yang terlantar dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari pasal tersebut, anak jalanan juga termasuk didalamnya yang sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan dan jaminan sosial oleh Negara karena sudah menjadi tugas Negara mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu agar tercapainya tujuan Negara sesuai dengan UUD 1945 (Itsnaini, 2010).

Anak merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang dimana didalamnya terdapat martabat sehingga harus dilindungi agar terpenuhi hak-hak nya. Anak sejak lahir sudah memiliki hak-hak untung diperjuangkan contoh nya seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Setiap orang tua wajib memperjuangkan hak anaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Batlajery, 2012).

Setiap anak yang sudah lahir ke dunia pada dasarnya sudah memiliki hak yang sama, begitu juga anak jalanan. Mereka berhak atas kesehatan, pendidikan, dan hak perlindungan dari Negara. Untuk menjamin hak tersebut, pemerintah menuangkannya dalam UU Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut setiap anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dan potensi yang memiliki peran penting dalam menjamin eksistensi Negara pada masa depan. Oleh sebab itu anak-anak sangat perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak nya baik secara fisik, moral, maupun sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rukhsal, 3015).

Tabel 1.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

| No | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1. | Anak Jalanan | 327 | 348 | 67 | 72 | 72 |
| 2. | Eks Psikotik | 1.669 | 1.742 | 1.654 | 1.375 | 1.375 |
| 3. | Pengemis | 150 | 170 | 134 | 147 | 147 |
| 4. | Gelandangan | 171 | 236 | 190 | 197 | 197 |
| 5. | Anak Balita Terlantar | 1.826 | 1.309 | 762 | 620 | 620 |
| 6. | Anak Terlantar | 14.450 | 13.960 | 11.009 | 9.607 | 9.607 |
| 7. | Pemulung | 450 | 511 | 467 | 465 | 465 |

Sumber : Website Bappeda Provinsi Yogyakarta

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah data penyandang masalah kesejahteraan sosial di Yogyakarta masih tinggi termasuk anak jalanan. Meskipun ada penurunan namun terjadi kenaikan lagi di tahun berikutnya.

Oleh sebab itu, perlu diadakan upaya perlindungan kesejahteraan anak terutama anak jalanan untuk memenuhi dan menjamin hak-hak tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, dibentuk pula komisi perlindungan anak yang bertujuan untuk memajukan, memantau hak-hak anak jalanan sehingga tidak terjadi pelanggaran hak agar tercapai semua pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut (Putra, Hasanah, & Nuriyah, 2015)

Akan tetapi dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun, banyak anak-anak terpaksa hidup di jalan. Anak tersebut terpaksa hidup di jalan dikarenakan orang tua mereka tidak mampu menghidupi dan memenuhi hak anak itu sendiri sehingga anak tersebut pun ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan banyaknya anak yang hidup di jalan, hal tersebut bisa membuat permasalahan yang dimana dapat mengganggu kondisi masyarakat sekitar (Anandar, Wibhawa, & Wibowo, 2015)

Hidup anak jalan bukanlah pilihan yang dipilih oleh anak, hal itu mereka lakukan dikarenakan berada didalam suasana yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Keberadaan mereka menjadi permasalahan bagi banyak pihak seperti keluarga, masyarakat, dan juga menjadi permasalahan bagi negara.

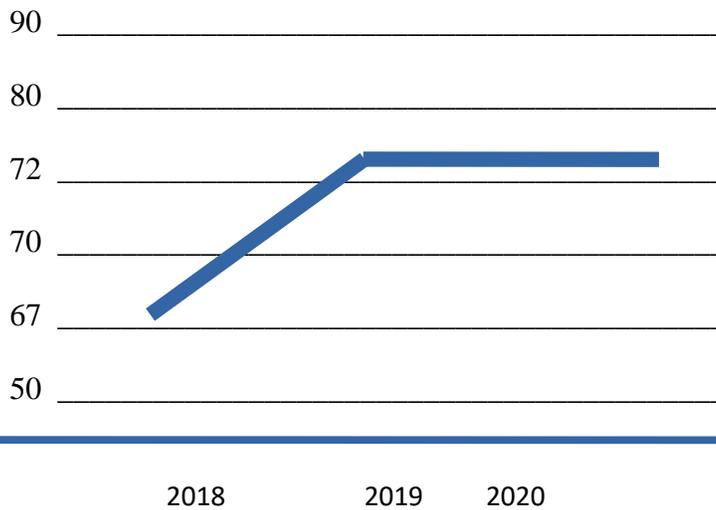
Anak jalan adalah salah satu permasalahan publik yang ada di Indonesia. Yogyakarta juga merupakan salah satu contoh kota yang mengalami permasalahan anak jalanan. Anak jalan di Provinsi Yogyakarta dapat berkembang dikarenakan Yogyakarta merupakan kota wisata yang dimana anak jalanan tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah.

Adapun ciri-ciri anak jalanan adalah sebagai berikut (Purwoko, 2013) :

- a Kehidupannya dilakukan selalu di tempat umum seperti jalanan, pertokoan, jalanan
- b Tidak memiliki pendidikan yang cukup dan banyak yang putus sekolah

c Berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Tabel 1.2 Data Spesifik Jumlah Anak Jalanan



Sumber : Website Bappeda Provinsi Yogyakarta

Dari data diatas dapat dilihat bahwa memang pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan yang sangat drastis, namun pada tahun 2018-2020 jumlah anak jalanan terjadi peningkatan dan tentu saja ini menjadi pertanyaan bagaimana kebijakan yang dijalankan hingga bisa terjadi kenaikan kembali. Kebijakan yang telah dibuat tentang penanganan anak jalanan pun terkendala pada saat dilakukan upaya penjangkauan sering kali terkendala sehingga menyebabkan konflik antara pelaksana kebijakan dengan pemberdaya anak jalanan dan juga anak-anak yang akan diberikan pembinaan.

Meskipun sudah dibuat perda tentang anak yang hidup diYijalan, masih saja banyak anak-anak yang berada dijalan dikarenakan faktor ekonomi.

Perhatian terhadap anak yang hidup di jalan tampaknya masih belum begitu besar dan solusi yang dapat menyelesaikan masalah ini. Selain pemerintah, lembaga-lembaga sosial yang harusnya bersentuhan langsung dengan anak-anak jalanan, masih belum menemukan akar masalah yang jelas.

Menurut Perda DIY, anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari (Yogyakarta.bpk.go.id).

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kasus anak jalanan, antara lain (Ayu Isrovani Pratiwi, Sundarso, 2015) :

- a Adanya masalah ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus terpaksa membantu orang tua dengan cara bekerja
- b Terjadinya migrasi, urbanisasi yang belum siap sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran
- c Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan anak tidak nyaman berada di rumah dan lebih memilih berada di jalan
- d Orang tua memanfaatkan anak sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga.

Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan memiliki masalah yang harus di selesaikan. Masalah tersebut yaitu tidak adanya penurunan jumlah anak jalanan pada tahun 2018-2020, bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019. Hal tersebut yang menimbulkan pertanyaan kenapa jumlah anak jalanan di DIY bisa bertambah.

Di Yogyakarta seharusnya masih banyak terlihat anak-anak kecil yang waktunya digunakan untuk belajar disekolah, menikmati masa kanak-kanak dengan bermain dengan teman sebaya nya dan juga mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Akan tetapi malah mereka berada dijalan dan menghadapi kerasnya dunia jalanan yang mereka rasakan. Sering kita lihat banyak anak kecil dilampu merah dengan sambal meminta minta ataupun mengamen. Mereka sangat tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka sendiri, bahkan ketika hujan dan panas pun bukan menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk mengais rejeki (Rima Melira, 2018)

Pemerintah provinsi Yogyakarta sudah membuat perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, namun masih banyak saja kasus yang terjadi kepada anak jalanan dan bahkan kasus nya bertambah dari tahun ke tahun. Pemprov Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta yang dipilih langsung oleh dinas sosial sebagai pelaksana lapangan kebijakan penanganan anak jalanan karena mereka

merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Ayu Isrovani Pratiwi, Sundarso, 2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak turun kejalan adalah dikarenakan faktor ekonomi yang memaksa anak-anak turun kejalan. Selain faktor ekonomi, banyak sekali penyebab yang mempengaruhi anak-anak turun kejalan contoh nya seperti kemiskinan, kekerasan rumah tangga, perceraian yang dialami oleh orang tuanya, pengangguran dan lainnya (Badrus Zaman, 2018). Kasus tersebut harus segera diselesaikan, jika tidak itu dapat membuat anak-anak tersebut memiliki masa depan yang tidak baik. Pada saat dewasa nanti, anak tersebut bisa menjadi pribadi yang bisa saja meresahkan warga.

Menurut perda DIY No. 6 Tahun 2011 pasal 4 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, tugas pemerintah daerah salah satu nya adalah memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam implementasi perlindungan anak yang hidup dijalanan, memberikan pelayanan penuh terhadap hak-hak anak yang hidup di jalan, dan juga memberikan fasilitas usaha penyelenggara pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di jalanan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a Menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan
- b Melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan
- c Melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan
- d Mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

Wewenang dan tugas pemerintah kota di atas tersebut bisa dijadikan gambaran bahwa pemerintah tidak bergerak sendiri melainkan membutuhkan peran LSM ataupun pihak swasta dalam penanganan dan juga menjamin hak-hak anak jalanan guna melancarkan dan membantu tugas pemerintah dalam penanganan hak anak jalanan di Provinsi Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pentingnya untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui seberapa jauh implementasi kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak anak jalanan. Pada penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu Provinsi Yogyakarta, karena peneliti melihat Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah anak jalanan yang cukup banyak dibanding provinsi lainnya. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 (Studi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan)”.

B Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan dan Perlindungan Anak Jalanan Tahun 2020 menurut Studi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan?
- 2 Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses implementasi Kebijakan Penanganan dan Perlindungan Anak Jalanan Tahun 2020 berdasarkan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan?

C Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Anak Jalanan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perlindungan anak jalanan dan pemenuhan hak anak jalanan dan juga ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

D Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan dan menjadi referensi untuk penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan.

Adapun manfaat praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah ataupun pihak swasta dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan untuk melindungi hak-hak anak jalanan.

E Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau studi-studi terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu:

1 Hasil Penelitian Nurwijayanti, A. M. (2012)

Penelitian Nurwijayanti, A. M. (2012) yang berjudul “Nurwijayanti, A. M. (2012). *Eksplorasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan anak jalanan dijalankan dalam perspektif hukum pidana.

Perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah penelitian Nurwijayanti, A. M. (2012) menganalisis bagaimana perlindungan anak jalan dijalankan dalam perspektif hukum pidana. Sedangkan

penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dalam penanganan anak jalanan dari perspektif organisasi pelaksana.

2 Hasil Penelitian Sulikah Asmorowati (2008)

Penelitian Sulikah Asmorowati (2008) yang berjudul “*Efektivitas Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Child Labour) Dengan Fokus Anak Jalanan Di Surabaya*”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak, khususnya yang berkaitan dengan anak jalanan di Surabaya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu penelitian diatas fokus penelitiannya adalah kepada pekerja anak sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya bukan hanya pekerja anak melainkan juga anak jalanan yang hidup di jalan karena terpaksa oleh ajakan orang tua mereka.

3 Hasil Penelitian Ronawaty Anasiru (2017)

Penelitian Ronawaty Anasiru (2017) yang berjudul “*Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar*”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan model studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipe-tipe kebijakan penanganan anak jalanan, menganalisis faktor pendukung tipe-tipe kebijakan,

dan juga menganalisis faktor penghambat tipe-tipe kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas fokus penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah sejauh mana implementasi kebijakan dan juga faktor apa saja yang mendukung dalam proses implementasi kebijakan.

4 Hasil Penelitian Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah, R. (2018)

Penelitian Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah, R. (2018) yang berjudul *"Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung"*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembinaan anak jalanan dan juga penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Bandung.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas memiliki fokus 2 objek yaitu penanganan anak jalanan dan juga penanggulangan kemiskinan. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah hanya berfokus pada anak jalanan.

5 Hasil Penelitian Adhila, A. P., Suyahmo dan Hamdan T. A. (2016)

Penelitian Adhila, A. P., Suyahmo dan Hamdan T. A. (2016) yang berjudul “*Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan di Kota Semarang*”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku yang tercipta di jalanan yang dilakukan oleh anak jalanan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas menganalisis tentang perilaku dari setiap anak jalanan dari segi perilaku sosial. Sedangkan penelitian ini lebih mengutamakan kebijakan yang dibuat dalam penanganan anak jalanan.

6 Hasil Penelitian Isti Rochatun (2011)

Penelitian Isti Rochatun (2011) yang berjudul “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis dan juga mengetahui dampak yang terjadi oleh anak jalanan terhadap eksploitasi tersebut.

Perbedaan yang terjadi antara penelitian diatas dan penelitian ini adalah jika penelitian diatas menganalisis bagaimana terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis dan juga dampak apa yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada proses implementasi kebijakan yang telah

dibuat dalam penanganan anak jalanan dan juga faktor apa saja yang mendukung proses implementasi kebijakan.

7 Hasil Penelitian Mursyid Itsnaini (2010)

Penelitian Mursyid Itsnaini (2010) yang berjudul “*Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah Di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Rumah Singgah Kawah dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk program pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.

Perbedaan yang terjadi antara penelitian diatas dan penelitian ini adalah jika penelitian diatas ingin mengetahui peranan Rumah Singgah Kawah sebagai bentuk penanganan anak jalanan. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana proses implementasi kebijakan berjalan dalam penanganan anak jalanan.

8 Hasil Penelitian Fikriyandi P., Desy H., & Eva N. H. (2015)

Penelitian Fikriyandi P., Desy H., & Eva N. H. (2015) yang berjudul “*Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah*”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana penjangkauan dan pemberdayaan anak jalanan melalui Rumah Singgah.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas berfokus pada pemberdayaan anak dirumah singgah. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus kepada bagaimana proses implementasi kebijakan yang terjadi dalam penanganan anak jalanan.

9 Hasil Penelitian Deawinadry dan Mochamad Wachid H. (2017)

Penelitian Deawinadry dan Mochamad Wachid H. (2017) yang berjudul *“Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan”*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan peraturan tersebut.

Perbedaan yang terjadi antara penelitian diatas dan penelitian ini adalah jika penelitian diatas memiliki 3 fokus yaitu gelandangan, pengemis dan juga anak jalanan. Sedangkan penelitian ini hanya memiliki 1 fokus yaitu terhadap anak jalanan.

10 Hasil Penelitian Engkus, E. (2019)

Penelitian Engkus, E. (2019) yang berjudul “*Implementasi Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Bandung*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dalam perlindungan anak jalanan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan dan juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Dalam penelitian ini terdapat strategi dalam pembinaan antara lain seperti pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, pembinaan rehabilitasi dan juga pemberdayaan.

F Kajian Teori

1 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum (Putri, 2020). Menurut Dye dalam (Widodo, 2018: 12) dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan “*whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya sebagai tindakan atau keputusan oleh pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Yang mana sejatinya kebijakan dibentuk atas dasar kesepakatan terhadap sebuah persoalan,

guna mencapai sebuah tujuan yang memiliki prioritas sasaran dan tujuan (Evans & Manning, 2003).

Menurut Keban (2004:55), kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu proses, sebagai suatu kerangka kerja dan sebagai suatu produk. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan sebuah prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dapat dilihat sebagai serangkaian rekomendasi atau kesimpulan, dan sebagai suatu proses, kebijakan dapat dilihat sebagai cara dimana suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu mekanisme dan program dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses negosiasi dan tawar menawar untuk merumus isu-isu dan metode pelaksanaannya”. (Tahir, 2011).

Pembuatan Kebijakan Publik tentunya melalui proses-proses dan berbagai tahapan. Menurut R. Dye dalam (Widodo, 2018:16), Proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

- proses identifikasi masalah

proses Identifikasi masalah kebijakan bisa dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

- Proses penyusunan agenda

Proses ini adalah aktivitas memfokuskan perhatian pada pembuat kebijakan dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu

- proses merumuskan kebijakan

proses ini adalah pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiatif dan penyusunan usulan kebijakan melalui perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, lembaga legislatif, presiden dan birokrasi pemerintah..

- Proses mengesahkan kebijakan

proses ini adalah Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh presiden, partai politik, kelompok penekan dan kongres.

- Proses implementasi/melaksanakan kebijakan

Proses ini adalah proses melalui anggaran publik, birokrasi dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi

- Proses mengevaluasi kebijakan

Proses ini adalah proses yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik)

Kebijakan Publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik menjadi “penuh warna”, dan kajiannya amat dinamis (Indiahono, 2009:20). Menurut Subarsono dalam

(Indiahono, 2009:21), untuk menggambarkan suatu proses kebijakan bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Proses Kebijakan dan Karakteristik

| Tahap | Karakteristik |
|-----------------------|---|
| Perumusan Masalah | Memberikan informasi tentang suatu keadaan yang menimbulkan masalah |
| Peramalan | Memberikan informasi tentang akibat di masa yang akan datang dari dilaksanakannya alternatif kebijakan termasuk membuat kebijakan |
| Rekomendasi Kebijakan | Memberikan informasi tentang manfaat yang didapat dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi |
| Monitoring Kebijakan | Memberikan informasi tentang memantau bagaimana kinerja organisasi pelaksana pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan |
| Evaluasi Kebijakan | Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan |

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2021)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai suatu aturan atau hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar aturan melainkan perlu dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan publik dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan, disusun dan disepakati

oleh para pembuat kebijakan yang berwenang dan ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, ataupun menjadi Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi aturan yang harus ditaati (Tahir, 2011).

2 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Aneta, 2010) implementasi kebijakan merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan tersebut tepat sasaran dan dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa organisasi pelaksana juga sangat berperan penting dalam proses implementasi kebijakan. jika organisasi pelaksana tidak bisa mengoptimalkannya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan terhadap produk kebijakan tersebut.

Selain itu, sumber daya juga sangat berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan dimana kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana jika sumber daya yang dimiliki tidak mumpuni. Akan tetapi pembuat kebijakan juga harus melihat sumber daya yang tersedia di daerahnya dan harus memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Jika semua faktor tersebut tidak berjalan beriringan, dapat dipastikan akan menghasilkan penilaian bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mendapat penilaian negatif. Ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, antara lain (Aneta, 2010) :

a Sasaran atau tujuan dari produk kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan, sasaran dari produk kebijakan merupakan unsur yang sangat penting dimana produk kebijakan tersebut akan berhasil jika kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tepat sasaran.

Ukuran dari ketepatan sasaran kebijakan adalah dimana harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan dari kebijakan itu sendiri. Ketepatan dikatakan berhasil jika permasalahan yang dibahas dalam kebijakan tersebut dapat menurun atau bahkan dapat diselesaikan. Dalam hal ini jika kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, maka produk kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak berhasil menyelesaikan masalah yang dibahas dalam kebijakan tersebut.

b Sumber daya yang tersedia dan dapat dimaksimalkan

Sumber daya merupakan satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut dapat meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana. Ketiga sumber daya tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan proses implementasi kebijakan.

Sumber daya manusia diperlukan dimana dibutuhkannya tenaga manusia yang berkualitas dalam melaksanakan kebijakan dengan cara turun langsung ke lapangan atau lokasi yang dianggap terdapat permasalahan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Sumber daya keuangan juga diperlukan karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber dana untuk menunjang kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

c Karakteristik organisasi pelaksana implementasi kebijakan

Pusat perhatian dalam organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan. hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para organisasi pelaksananya. Pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang disiplin. Pada konteks lain juga diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Dari variabel tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang baik dan berlangsung dalam

antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Nugroho dalam (Aneta, 2010) ada beberapa aspek untuk melakukan implementasi kebijakan, yaitu:

- a Syaratnya harus menjamin bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan tidak menimbulkan masalah
- b Dalam pelaksanaannya harus tersedia sumber daya yang mencukupi
- c Dalam pelaksanaannya sumber daya yang dibutuhkan harus benar-benar tersedia
- d Kebijakan yang akan diimplementasikan harus didasari hubungan kausal yang andal
- e Harus diperhatikan seberapa banyak hubungan kausal yang terjadi. Semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai
- f Dalam pelaksanaannya, hubungan saling ketergantungan harus kecil dikarenakan jika semakin tinggi angka ketergantungan, maka pelaksanaannya tidak berjalan efektif
- g Dalam pelaksanaannya harus memiliki pemahaman yang mendalam dan memiliki kesepakatan terhadap tujuan

- h Dalam pelaksanaannya tugas-tugas sudah diperinci dan ditempatkan dengan benar
- i Harus memiliki koordinasi dan komunikasi yang baik
- j Pihak yang memiliki kewenangan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang baik.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2008:65) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan memahami apa yang terjadi sebenarnya sesudah suatu program atau peraturan dinyatakan merupakan titik perhatian pelaksanaan kebijakan yaitu kondisi yang timbul setelah disahkannya peraturan yang mencakup baik usaha administrasinya ataupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat,

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerintah atau pejabat pemerintah yang dibantu oleh swasta dan mengarah pada tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan yang telah dibuat (Abdul wahab, 2013).

Menurut Bambang Sunggono dalam (Hayati, 2018), implementasi kebijakan memiliki 4 proses tahapan yaitu pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan, dampak dari kebijakan dan dampak akhir dari kebijakan. Semua kebijakan itu dilaksanakan bukan hanya dengan pemerintah melainkan juga membutuhkan bantuan pihak luar seperti pihak swasta ataupun LSM.

Indikator berjalan nya implementasi kebijakan ada 3 yaitu *interpretation*, *organization* dan *application*. *Interpretation* merupakan penafsiran dari sebuah kebijakan dan dibahas bagaimana kebijakan itu akan dibuat dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. *Organization* merupakan suatu cara agar kebijakan tersebut baik digunakan untuk siapa dan bagaimana pengorganisasian kebijakan tersebut. Sedangkan *application* adalah proses mengaplikasikan atau menerapkan kebijakan yang telah dibuat dengan memperhatikan bagaimana dampak yang terjadi setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau kelompok-kelompok pemerintah dan memiliki tujuan namun berpacu pada kebijakan yang telah dibuat dan juga memiliki 3 indikator penting seperti sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia dan karakteristik organisasi pelaksana kebijakan yang dimana indikator ini sangat penting dalam berjalannya sebuah kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan juga harus sejalan dan mengacu pada kebijakan yang telah dibuat agar terciptanya keselarasan dan juga berdampak positif bagi masyarakat.

3 Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan anak yang karena faktor tertentu masuk kehidupan jalanan yang bertujuan untuk mencari penghasilan dan nafkah.

Anak jalanan menyatu dengan kehidupan jalanan kota dimana jalanan menjadi tempat hidup dan menjadi sarana mencari penyelesaian masalah ekonomi. Keberadaan mereka menjadi suatu ciri di kehidupan perkotaan besar, sehingga hampir di semua kota besar tidak memiliki anak jalanan (Anasiru, 2017).

Menurut (Sylvia Rizzana Moch. Saleh Soeaidy Minto Hadi, 2006) Anak jalanan berusia 6-15 tahun yang sudah putus sekolah dan tidak tinggal bersama orang tua mereka dan seharian untuk bekerja memperoleh penghasilan yang berada di tempat-tempat umum, jalanan, dan persimpangan.

Ciri ciri lainnya dari anak jalanan adalah anak-anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, ciri-ciri anak jalanan yaitu melepaskan diri dari keluarga, mengalami putus sekolah, dan melepaskan diri dari lingkungan kehidupan dan ikut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di tempat-tempat umum (Purwoko, 2013).

Menurut (Anasiru, 2017) Dari pengertian diatas dapat ditekankan bahwa kata “anak” pada istilah “anak jalanan” sebagai dasar pemahaman tentang problematika mereka. Dengan menempatkan anak jalanan sebagai konteks anak, maka permasalahan yang dihadapi merupakan hak-hak anak.

Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2002), anak jalanan bisa dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu *Children of the street*, *children on the street* dan *children from families from the street*. *Children of the street* merupakan anak-anak yang memang memilih untuk berada di jalan untuk mencari penghasilan. *Children on the street* merupakan anak-anak jalanan yang mencari penghasilan di jalan namun masih pulang ke keluarganya. Sedangkan *Children from families from the street* adalah anak-anak yang memang sudah dari lahir dan dibesarkan oleh orang tua mereka di jalan dan anak-anak tersebut membantu orang tua mereka mencari penghasilan.

Indikator yang menjadikan anak-anak tersebut harus hidup di jalan adalah terputusnya sekolah dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membiayai anak tersebut untuk sekolah sehingga anak-anak tersebut harus terpaksa hidup di jalan. Selain itu, indikator lainnya adalah *Children of the street*, *children on the street* dan *children from families from the street* yang sudah dijelaskan di atas.

Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan yaitu anak jalanan terjadi dikarenakan anak tersebut mengalami putus sekolah sehingga dia hanya bisa membiayai keberlangsungan hidupnya. Faktor dari orang tua juga dapat mempengaruhi anak jalanan tersebut. Contohnya seperti anak yang lahir dan dibesarkan di jalan oleh orang tuanya dan orang tua tersebut mendidik anak tersebut agar mencari penghasilan dari jalan.

4 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III dalam (Ashari, 2020) Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor dari implementasi kebijakan yaitu: 1). Komunikasi, 2). Sumber Daya, 3). Disposisi, dan 4). Struktur Birokrasi

Dalam proses implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mendukung dalam berjalannya kebijakan tersebut sangat berpengaruh apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti sasaran kebijakan, sumber daya yang dibutuhkan dan juga sifat ataupun karakteristik organisasi pelaksana kebijakan (Parulian, 2013).

G Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan di teliti. Berdasarkan landasan teori diatas, dapat diterangkan definisi konseptual dari masing-masing variabel, antara lain:

- 1 Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang dibuat dan ditujukan untuk kepentingan publik. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan Perda DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Anak Jalanan.
- 2 Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan isu atau kepentingan publik. Implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana proses implementasi kebijakan Perda DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Anak Jalanan dan juga Faktor apa yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan.
- 3 Anak Jalanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak jalanan yang hidup di jalan berusia sekitar 6-15 tahun dimana mereka sudah putus sekolah dan tidak tinggal bersama orang tua ataupun keluarganya. Ciri-ciri lainnya yaitu melepaskan diri dari keluarga, lingkungan dan juga mengalami putus sekolah dimana mereka juga ikut dalam kehidupan yang berpindah-pindah ditempat umum.

H Definisi Operasional

Mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn dalam (Aneta, 2010) maka implementasi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Anak Jalanan dalam penelitian ini dilihat dari aspek sasaran kebijakan, sumber daya dan karakteristik organisasi pelaksana.

Tabel 1.4 Definisi Operasional

| Variabel | Indikator | Parameter |
|------------------------------------|---|--|
| Sasaran Kebijakan | Anak Jalanan | Anak jalanan berusia 6-15 tahun yang mencari nafkah atau hidup di jalanan |
| Sumber Daya | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber daya manusia pada Dinas Sosial 2 Sumber Daya Keuangan pada Dinas Sosial 3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> a Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan jumlah pegawai Dinas Sosial - Kesesuaian latar belakang pendidikan staff Dinas Sosial - Keterampilan yang dimiliki staff Dinas Sosial b Sumber Daya Keuangan : <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran untuk program penanganan anak jalanan - Adanya dana bantuan dari pihak lain c Sumber Daya Sarana dan Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan rumah singgah - Ketersediaan tempat pelatihan/pembinaan anak jalanan |
| Karakteristik Organisasi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> a Disiplin b Persuasif c Demokratis | <ol style="list-style-type: none"> a Disiplin : Dinas sosial harus disiplin dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai b Persuasif : Dinas Sosial harus bersikap persuasif terhadap anak jalanan yang akan dibina atau diberikan pengetahuan. c Demokratis : Dinas Sosial harus memiliki sikap demokratis dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan |

| | | |
|---------------|--|---|
| | | kebijakan yang telah dibuat |
| Faktor-faktor | <ul style="list-style-type: none"> a Komunikasi b Struktur Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> a Komunikasi: kebijakan akan berjalan baik jika adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait berjalannya suatu kebijakan b Struktur Birokrasi: adanya penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan dan juga adanya pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. |

I Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam hal ini menangani dan melindungi anak jalanan yang berada di Provinsi Yogyakarta. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam menganalisa datanya bersifat induktif yang menekankan generalisasi pada hasil serta peneliti menjadi instrumen kunci (Sugiyono, 2010). Peneliti

sebagai instrumen harus mampu melihat fenomena sosial yang terjadi dilapangan dengan menggunakan seluruh indra untuk memperoleh data (Mulyadi, 2013). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dikarenakan dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber lalu menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan.

2 Unit Analisa

Unit analisa merupakan salah satu komponen penelitian kualitatif. Unit analisa berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unit analisa dalam penelitian ini adalah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

3 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh atau didapatkan dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi ke lapangan (Subagyo, 1997). Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian yang relevan dengan topik penelitian seperti artikel, buku, berita, jurnal dan website resmi pemerintah (Hasanah, 2017).

a Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan antara lain wawancara dari pihak Dinas Sosial yaitu Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Sosial dan Rehabilitas Sosial Anak.

b Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan antara lain seperti Perda terkait yaitu Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Anak Jalanan dan juga jurnal-jurnal ataupun buku yang relevan dengan penelitian ini.

4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Dari sumber tersebut dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan kepada narasumber untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan jika peneliti bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan tentang informasi yang dapat dipahami yang berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan

eksplorasi terhadap isu yang ingin diteliti. Narasumber yang akan diteliti antara lain Dinas Sosial.

b Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk peneliti dalam mengumpulkan data secara kualitatif. Sumber informasi ini dapat berbentuk tulisan seperti Buku, Jurnal dan juga Undang-Undang contohnya seperti Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Anak Jalanan.

Tabel 1.5 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber

| Jenis data | Teknik Pengumpulan Data | Sumber |
|------------|--|---|
| Primer | Wawancara | Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Sosial dan Rehabilitas Sosial Anak |
| Sekunder | Menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini | Buku, Jurnal, Undang-Undang dan juga Website Resmi Dinas Sosial |

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2021)

5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh (Purwoko, 2013) yaitu menggunakan analisis model interaktif dengan tiga prosedur yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

a Reduksi Data

Data Reduksi merupakan proses sentralisasi, pengumpulan, transformasi dan penyederhanaan data yang dikumpulkan di lapangan dari dokumen tertulis. Dalam analisis data ini dilakukan reduksi, dimulai dari review, klasifikasi data, menulis catatan, mengeksplorasi tema untuk mengevaluasi informasi yang relevan.

b Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai kumpulan data tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini memudahkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan data penelitian sehingga dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan

menggunakan cara seperti grafik, bagan dan juga bentuk *teks naratif* atau kumpulan kalimat (Purwoko, 2013).

c Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang terlintas dalam pemikiran peneliti selama peneliti menulis dan juga bertukar pemikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan penulisan agar tidak menjadi subyektif, dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kecocokannya, kebenarannya dan juga kecocokannya.

Verifikasi penelitian ini dilakukan secara bertahap dan terus menerus sepanjang penelitian ini berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk mencari makna dan menganalisis dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul dan disimpulkan sehingga terbentuk penelitian yang valid untuk mendukung teori ataupun penyempurnaan teori (Purwoko, 2013).